

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat

The Effect Of Economic Growth And Wage On The Unemployment Rate
In West Java Province

¹Dyas Tama, ²Atih Rohaeti Daria, ³Ade Yunita Mafruhah

¹Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹dyastamasumantry@gmail.com, ²ardariah.68@gmail.com, ³dnita90@gmail.com

Abstract: West Java is a province with the largest population in Indonesia. In addition to the large population, West Java is also one of the provinces with the second highest unemployment in Indonesia. According to Kaufman and Hotckiss and Okun's Law, there are two indicators that affect unemployment, namely economic growth and wages. Based on this, this study seeks to identify the effect of these two indicators on the unemployment rate in West Java. To answer this question, this research uses a descriptive method with a quantitative approach. The results is Economic growth affects the unemployment rate in West Java with a coefficient of -0.88. That is, when economic growth has increased, the unemployment rate in West Java Province has decreased by 0.88 percent. Meanwhile, wages affect the unemployment rate in West Java Province with a coefficient of +0.47. That is, an increase in wages in the province of West Java will increase the unemployment rate by 0.47 percent.

Keywords: unemployment, Economic Growth, Wages

Abstrak. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yakni sebesar 48,04 juta jiwa, dan juga menjadi salah satu provinsi dengan pengangguran terbanyak ke dua di Indonesia. Menurut Kaufman dan Hotckiss serta Hukum Okun, terdapat dua indikator yang mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah. Berdasarkan hal ini maka penelitian ini berupaya mengidentifikasi pengaruh kedua indikator tersebut terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat dengan nilai koefisien -0.88. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0.88 persen. Sementara itu, upah mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien +0.47. Artinya, kenaikan upah di Provinsi Jawa Barat akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0.47 persen.

Kata Kunci: Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah

A. Pendahuluan

Penduduk terbesar di Indonesia terletak di provinsi Jawa Barat, dengan jumlah 48,04 juta jiwa. Jumlah tersebut diikuti pula dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Pengangguran di 5 Provinsi Tertinggi di Indonesia 2018 (Persen)

Provinsi	Tingkat Pengangguran
Banten	8.52
Jawa Barat	8.16
Maluku	7.27
Kepulauan Riau	7.12
Sulawesi Utara	6.86

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Jawa Barat menempati urutan ke dua dengan tingkat pengangguran sebesar 8.16 persen, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu 5.13 persen.

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu alat pengukur dari pertumbuhan suatu perekonomian salah satunya adalah PDB. Dalam Hukum Okun menjelaskan ada hubungan negative antara pertumbuhan PDB terhadap Pengangguran. Ketika PDB naik, maka pengangguran akan turun. Perkembangan data PDRB di Jawa

Barat dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB
2013	1,093,585.505
2014	1,149,216.057
2015	1,207,232.342
2016	1,275,527.644
2017	1,342,953.376

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2018

Tabel 2. memperlihatkan bahwa setiap tahunnya PDRB Provinsi Jawa Barat meningkat. Dalam periode tahun 2013 hingga 2017, kenaikan PDRB Jawa Barat tumbuh rata-rata sebesar 5 persen. Sektor lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar PDRB di Jawa Barat adalah sector industry pengolahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 43 persen dari total PDRB di Jawa Barat keseluruhan.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem upah dengan mengeluarkan kebijakan upah minimum. Upah Minimum telah diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tentang Upah Minimum. Dalam lima tahun terakhir, upah minimum di Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan rata rata sebesar 14.28 persen, meskipun pada tahun 2015 UMR tidak mengalami kenaikan. Data kenaikan upah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Upah Minimum Regional Jawa Barat tahun 2013 – 2017 (Rupiah)

Tahun	Upah
2013	850.000
2014	1.000.000
2015	1.000.000
2016	1.312.355
2017	1.420.624

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

B. Landasan Teori

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang telah masuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 2000). Pengangguran disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang tidak dapat diserap seluruhnya.

Menurut Sonny Sumarsono (2009), pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang telah memasuki angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan, yang akan diperoleh dari penjualan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi yang dilakukan secara alamiah

akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi.

Menurut Sonny Sumarsono (2009) upah merupakan suatu yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja itu sendiri maupun untuk keluarganya

Menurut Gilarso (2003) upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan sebagainya). Selain itu, Gilarso membagi upah menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (kemampuan upah tersebut membeli sejumlah barang dan jasa). Upah dalam arti sempit dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan yang penulis peroleh dengan menggunakan alat *evIEWS7* dan juga melalui analisis regresi berganda

Tabel 4. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.42942	1.985390	7.771481	0.0000
PDRB	-0.885205	0.163816	-5.403663	0.0001
UPAH	0.477103	0.365893	1.303940	0.2119
R-squared	0.764808			
F-statistic	24.38881			
Prob(F-statistic)	0.000019			

Sumber: Hasil Data Diolah

1. Uji T-statistik

a. Variabel PDRB

Dari tabel 4.4 diperoleh nilai probabilitas untuk variabel PDRB adalah sebesar 0.0001 dengan signifikansi sebesar 0.05 (5%). Karena variabel PDRB probabilitasnya sebesar $0.0001 < 0.05$, maka variabel PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

a. Variabel Upah

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa probabilitas variabel upah mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0.2119, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05, maka variabel upah dianggap tidak berpengaruh signifikan ($0.2119 > 0.05$).

2. Uji F

Dari tabel 4 diperoleh probabilitas untuk variabel PDRB dan upah mendapatkan nilai 0.000019 dengan signifikansi sebesar 0.05 (5%). Karena kedua variabel bebas tersebut mendapatkan nilai sebesar $0.000019 < 0.05$, maka variabel PDRB dan upah secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap

- tingkat pengangguran.
- Koefisien Determinasi
Dari hasil regresi yang terdapat pada tabel 4 diketahui bahwa nilai R-squared adalah 0.764808. Artinya, 76.48 persen variasi pada Pengangguran bisa dijelaskan oleh variasi PDRB dan upah, sementara sisanya 23.52 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam persamaan.

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran

Tabel 5. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
PDRB	-0.885	-5.403663	0.0001

Sumber: Hasil Data Diolah

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari nilai koefisiennya yaitu sebesar 0.88. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 100 Triliun Rupiah PDRB di Provinsi Jawa Barat akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 0.88 persen.

Berdasarkan hasil pengolahan data, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, jika PDRB mengalami kenaikan, maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

Ketika PDRB mengalami kenaikan, maka output produksi dari barang dan jasa meningkat. Kemudian akan berdampak pada kenaikan faktor-faktor produksi yakni salah satunya adalah penggunaan tenaga kerja, yang

mengakibatkan menurunnya tingkat pengangguran.

Tabel 6. Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2018

Sektor Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	
	Jumlah (orang)	Persentase
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3196145	15.28%
Pertambangan dan Penggalian	130434	0.62%
Industri Pengolahan	4489839	21.47%
Pengadaan Listrik dan Gas	49501	0.24%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	127612	0.61%
Konstruksi	1315045	6.29%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4767534	22.79%
Transportasi dan Pergudangan	1054249	5.04%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1489488	7.12%
Informasi dan Komunikasi	292502	1.40%
Jasa Keuangan dan Asuransi	416961	1.99%
Real Estate	88803	0.42%
Jasa Perusahaan	360486	1.72%
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541750	2.59%
Jasa Pendidikan	994477	4.75%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	369226	1.77%
Jasa Lainnya	1232405	5.89%

Sumber : Data Diolah

Sektor usaha yang menjadi penyumbang pendapatan di Provinsi Jawa Barat yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi, dan yang terakhir adalah sektor transportasi. Ke empat sektor tersebut menyumbang lebih dari 50 persen pendapatan di Jawa Barat. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menyumbang total PDRB dengan persentase sebesar 42,16%. Perdagangan sebesar 14.87%, pertanian kehutanan 8.67% dan konstruksi 8.44%. Namun penyerapan tenaga kerja paling banyak adalah sektor perdangan.

2. Pengaruh Upah Terhadap Tingkat Pengangguran

Tabel 7. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
UPAH	0.477103	1.303940	0.2119

Sumber: Hasil Data Diolah

Pengaruh upah terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.2119. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 100.000 Rupiah upah di Provinsi Jawa Barat akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0.21 persen.

Berdasarkan hasil pengolahan data, tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya ketika upah naik, maka tidak selalu diikuti oleh penyerapan tenaga kerja.

Namun, di lain sisi, kenaikan *marginal cost* akibat dari kenaikan upah tidak langsung berdampak pada kebijakan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya. Hal

tersebut dapat terjadi karena pendapatan perusahaan tersebut dapat menutupi kenaikan biaya yang ditanggung perusahaan tersebut. Selain itu, jika perusahaan melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya, perusahaan harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar pesangon karwayannya, dan juga jika perusahaan akan merekrut kembali tenaga kerja baru, perusahaan tersebut harus mengeluarkan uang lebih untuk melakukan perekrutan tenaga kerja baru.

Elastisitas upah menunjukkan efek perubahan tingkat upah terhadap perubahan jumlah tenaga kerja. Berikut adalah elastisitas upah :

Tabel 8. Elastisitas Upah

Tahun	Elastisitas	Keterangan
2002	1.467854577	Elastis
2003	-1.138775165	Elastis
2004	1.115662675	Elastis
2005	-1.311435025	Elastis
2006	1.380119234	Elastis
2007	-0.986451878	Inelastis
2008	2.646300007	Elastis
2009	-1.612410881	Elastis
2010	0.421339042	Inelastis
2011	-1.160824845	Elastis
2012	-3.213533452	Elastis
2013	0.226242173	Inelastis
2014	-0.627859352	Inelastis
2015	-0.698744447	Inelastis

Tahun	Elastisitas	Keterangan
2016	0.070298905	Inelastis
2017	-1.389525231	Elastis
2018	0.177432637	Inelastis
Rata-rata	-0.272606531	Inelastis

Sumber: Hasil Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa elastisitas upah terhadap pengangguran adalah *inelastic*. Dengan kata lain kurva tersebut tidak sensitive terhadap adanya perubahan tingkat upah, adanya perubahan pada tingkat upah tidak terlalu diikuti oleh perubahan jumlah penyerapan tenaga kerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDRB mengalami kenaikan, maka tingkat pengangguran akan mengalami turun.
2. Variabel upah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti ketika ada kenaikan upah, maka pengangguran akan ikut naik.

E. Saran

Berikut saran yang diberikan oleh penulis:

1. Dari segi pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi terus tumbuh agar tingkat

pengangguran mengalami penurunan. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

2. Dari segi upah, pemerintah harus tetap memperhatikan regulasi yang sudah berlaku. Selain itu, Pemerintah harus menjaga stabilitas harga agar dengan upah yang ada, masyarakat dapat mempertahankan daya beli.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2013-2018). *Jawa Barat Dalam Angka*. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik.
- Gilarso, T SJ. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi (Edisi Keenam)*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sukirno, S. (2008). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.